

E-LKPD PPKn

Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia



Nama	:
Kelas	:
No. Urut	:
Kompetensi Dasar	3.3 Menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

A. Simaklah penjelasan materi pada video berikut!



B. Jawablah soal yang ada pada rekaman suara berikut pada tempat yang disediakan! Klik tanda panah untuk mendengarkan bunyi soal!



Jawaban



C. Jawablah soal –soal berikut dengan memilih benar atau salah!

Klik tanda panah untuk melihat jawaban!

1. Pasal 1 ayat 1 (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara atas dasar kekuasaan.
2. Perjanjian antarnegara yang telah disahkan berlaku mengikat negara peserta, termasuk warga negara disebut traktat.
3. Lembaga peradilan yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD dasar adalah MA.
4. Yurisprudensi adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
5. *ius constituendum* adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.



D. Jawablah soal-soal berikut dengan memilih huruf A, B, C, D atau E!

1. Yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah
 - A. sekumpulan peraturan yang bersifat sementara
 - B. peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi
 - C. bersifat memaksa
 - D. mengatur perilaku warga masyarakat
 - E. adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut
2. Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi
 - A. hukum formil dan hukum materil
 - B. hukum tertulis dan tidak tertulis
 - C. hukum publik dan privat
 - D. hukum nasional dan internasional
 - E. hukum traktat dan hukum yurisprudensi

3. Dibawah ini yang termasuk contoh kasus dari hukum perdata adalah

- A. Korupsi
- B. perebutan harta warisan
- C. Penculikan
- D. Pelanggaran dalam pemilu
- E. Penipuan

4. Hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu di sebut dengan hukum

- A. positif
- B. Negatif
- C. Pidana
- D. Publik
- E. Material

5. Berikut ini yang bukan termasuk contoh hukum privat adalah

- A. perseorangan
- B. waris
- C. harta kekayaan
- D. dagang
- E. tata negara



**F. Pasangkanlah pernyataan dengan jawaban yang sesuai!
letakkan jawaban dibawah pada pasangan yang tepat!**

No.	Pernyataan	Jawaban
1.	Perulangan perilaku yang sama dalam masyarakat setiap kali terjadi situasi yang sama dan diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum karena dirasakan seseuai dengan tuntutan keadilan	
2.	Pendapat para ahli hukum yang pengaruhnya besar terhadap perkembangan hukum dan dijadikan pedoman dalam keputusan oleh hakim	
3.	Perjanjian atau persetujuan diantara dua negara atau lebih untuk bisa mencapai hubungan hukum tentang obyek-obyek hukum dengan kepentingan yang sama.	
4.	Keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.	
5.	Upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri	

Kebiasaan

Traktat

Doktrin

Yurisprudensi

Banding